



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARGONO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**
3. NHK : **156297**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 532.895.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/192 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 381.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/70 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 61.895.000
3. Tanah Seluas 1107 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 363 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 219.000.000**

1. MOTOR, HONDA HONDA VARIO 110 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 15.650.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 2.751.306****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 67.500.000****Sub Total** **Rp. 837.796.306****III. HUTANG** **Rp. 175.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

662.796.306

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.